



RENJA PERUBAHAN 2025

DINAS KESEHATAN KAB. TANAH LAUT



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan merupakan Langkah awal untuk pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini, adalah Perubahan yang sudah memiliki tujuan dan rencana agar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada rencana kerja murni melalui pendanaan yang bersumber dari APBD atau APBN maupun sumber pendanaan lainnya dapat memenuhi dan mencapai tujuan strategis yang telah direncanakan

Kami sangat menyadari bahwa Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu Masukan dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya untuk perbaikan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut di Tahun yang akan datang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, Juni 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut,



dr. Hj. Isna Farida, M.Kes
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19740612 200501 2 016

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	9
.....	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Tujuan Renja Perangkat Daerah	29
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	30
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN	31
BAB V PENUTUP	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 - 2026 dan Renstra Perangkat Daerah dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan menjadi rangkaian dalam Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Dinas Kesehatan serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. perubahan Rencana kerja disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal Perubahan;
- c. penyusunan rancangan
- d. perumusan rancangan akhir; dan
- e. penetapan

Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD perubahan serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya evaluasi Renja Dinas Kesehatan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas kesehatan untuk Tahun Anggaran 2025 ini adalah Dokumen Perencanaan Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang mana merupakan Tahun kedua pada Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2026,

Dalam upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025, tentunya diperlukan Perencanaan yang matang, terpadu dan Terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2026;
21. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 tanggal 27 Mei 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 pada triwulan IV
2. Singkronisasi dan Optimalisasi pencapaian target kinerja RPD Tahun 2025 sd 2026, khususnya untuk pencapaian target kinerja Tahun 2025
3. Menindaklanjuti kebijakan Nasional dan propinsi yang harus di alokasikan di daerah.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah untuk :

1. Menjabarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2026;
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu, tahun berjalan dan tahun akan datang;
3. Merumuskan rencana perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
4. Menjadi pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan (IKU) dan target sasaran (IKK) Kepala Dinas Kesehatan;
5. Meningkatkan Koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ;
6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran Strategi dan kebijakan pembangunan Kesehatan Daerah Tahun 2025;

7. Meningkatkan system surveilans dan sistem informasi Kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat
8. Menjadi acuan untuk Menyusun evaluasi kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
9. Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan

1. 4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
- 4.2. Reviu Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025
- 4.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan berkewajiban menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan melaporkan hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II sebagai bentuk Akuntabilitas Dinas Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah, Hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan pada Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Tahun 2025, kemudian dibandingkan dengan realisasi sampai triwulan I Tahun 2025, Tolak ukur keberhasilan Tujuan (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2025 mengacu kepada ketercapaian sasaran (IKK) dan Program berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2026

Berdasarkan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025- 2026 serta tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan mengacu kepada ketercapaian sub kegiatan berdasarkan penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dan Tolak Ukur keberhasilan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 mengacu Kepada ketercapaian semua Sub Kegiatan bidang bidang dan unit unit pelaksana Teknik (UPT) dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025
sampai dengan Triwulan I

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2025 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%	
1	2		3	4		5	6	7=(6/4)	8	9	10=(8/5)	
DINKES						256.386.941.271		36,2%	84.268.434.723	172.118.506.548	32,9%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Nilai sakin dinas kesehatan	82	%	150.073.311.619,84			58,74 %	58.894.523.128	91.178.788.492	39%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase capaian perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	136.414.904			57%	31.554.000	104.860.904	23%
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	117.020.649	4	Dok	57%	24.784.000	92.236.649	21%
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	19.394.255	2	Lap	50%	6.770.000	12.624.255	35%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	134.471.891.004			93%	55.254.577.477	79.217.313.527	41%
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1200	org	134.432.127.778	1021	org	85%	55.251.427.477	79.180.700.301	41%

	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	39.763.226	1	Dok	100%	3.150.000	36.613.226	8%
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase capaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	%	39.763.226			50%	960.000	38.803.226	
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Lap	39.763.226	1	Lap	50%	960.000	38.803.226	2%
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	12.000.000			0%	-	12.000.000	0%
	6	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70	Pkt	-	0	Pkt	0%	-	-	0%
	7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	org	12.000.000	0	org	0%	-	12.000.000	0%
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	85	%	778.740.759,90			63%	223.394.034	555.346.726	29%
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Pkt	69.998.176	6	Pkt	100%	57.732.260	12.265.916	82%
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Pkt	109.356.531	3	Pkt	100%		109.356.531	0%

		10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Pkt	58.687.113	2	Pkt	100%	52.428.038	6.259.075	89%
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Pkt	253.427.419	2	Pkt	100%	22.951.450	230.475.969	9%
		12	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Pkt	28.400.000	0	Pkt	0%		28.400.000	0%
		13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	250.874.950	5	Lap	42%	90.282.286	160.592.664	36%
		14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dok	7.996.571	0	Dok	0%		7.996.571	0%
	VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	85.500.369,60			100%	-	85.500.370	0%
		15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37	Unit	85.500.369,60	37	Unit	100%		85.500.370	0%
	VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	13.781.673.437			36%	3.262.034.667	10.519.638.770	24%
		16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16	Lap	1.888.220.000	5	Lap	31%	161.501.850	1.726.718.150	9%

	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	11.893.453.437	5	Lap	42%	3.100.532.817	8.792.920.620	26%
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	767.327.920			71%	122.002.950	645.324.970	16%
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	Unit	568.320.000	14	Unit	82%	65.927.950	502.392.050	12%
	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74	Unit	49.950.000	22	Unit	30%	10.275.000	39.675.000	21%
	20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	149.057.920	2	Unit	100%	45.800.000	103.257.920	31%

II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100	%	102.220.780.861			64%	30.997.542.009	71.223.238.852	30%
			Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100	%				100%			
			Persentase FKTP yang terakreditasi (minimal madya)	87	%				100%			
IX	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	100	%	38.404.511.507,36			30%	4.616.166.725	33.788.344.782	12%
	21	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	6	Unit	4.945.876.633,21	0	Unit	0%	101.691.000	4.844.185.633	2,06%
	22	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	13	Unit	4.524.648.786,92	0	Unit	0%		4.524.648.787	0,00%
	23	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standa	342	Unit	5.626.653.063,00	221	Unit	65%	2.055.114.509	3.571.538.554	36,52%
	24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	11	Unit	3.374.602.725,63	1	Unit	9%	114.482.500	3.260.120.226	3,39%

25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2	Unit	299.023.727,60	1	Unit	50%	11.638.000	287.385.728	3,89%
26	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	17	Unit	3.965.840.971	0	Unit	0%	4.000.000	3.961.840.971	0,10%
27	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / Regional Maintaince Center	350	Unit	429.960.000	0	unit	0%		429.960.000	0,00%
28	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	7	Unit	505.162.000	0	Unit	0%		505.162.000	0,00%
29	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2	Pkt	14.609.635.600	2	Pkt	100%	2.312.860.716	12.296.774.884	16%

		30	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	20	Pkt	123.108.000	10	Pkt	50%	16.380.000	Rp 106.728.000	13%
	X	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	100	%	63.624.082.453,76			26%	26.341.090.284	37.282.992.170	41%
		31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6866	org	1.164.644.062	1851	org	27%	153.435.000	1.011.209.062	13%
		32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6544	org	34.482.971,60	2018	org	31%	19.095.360	15.387.612	55%
		33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6242	org	465.930.761	1500	org	24%	74.840.000	391.090.761	16%
		34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30898	org	43.966.023	3816	org	12%		43.966.023	0%
		35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51600	Anak	223.613.519	265	Anak	1%	9.400.000	214.213.519	4%

	36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2344 62	org	266.643.237,08	62348	org	27%	60.118.950	206.524.287	23%
	37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37214	org	284.785.343,41	8527	org	23%		284.785.343	0%
	38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2796 2	org	39.844.421	11080	org	40%	21.394.150	18.450.271	54%
	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4287	org	72.889.337	3154	org	74%	20.803.350	52.085.987	29%
	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	510	org	208.504.918,70	45	org	9%	22.243.600	186.261.319	11%
	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4679	org	861.938.254,14	1556	org	33%	17.540.974	844.397.280	2%
	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8721	org	76.846.920,00	2000	org	23%	3.930.000	72.916.920	5%

43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2	dok	129.108.000	1	dok	50,00%	9.378.000	119.730.000	7%
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	11	dok	44.461.200	0	dok	0,00%		44.461.200	0%
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	dok	97.985.132,00	1	dok	33%	19.295.000	78.690.132	20%
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3	dok	75.250.900	2	dok	67%	31.498.900	43.752.000	42%
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	dok	1.034.982.000	0	dok	0%		1.034.982.000	0%
48	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	dok	235.704.000	0	dok	0%		235.704.000	0%
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12	dok	71.443.221	5	dok	42%	2.100.000	69.343.221	3%

	50	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6	dok	99.815.302	1	dok	17%	10.860.000	88.955.302	11%
	51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	516	org	33.614.544	450	orang	87%	1.960.000		6%
	52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5	org	167.612.237,16	0	orang	0%		167.612.237	0%
	53	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	Dok	25.795.000	1	Dok	20%	3.440.000	22.355.000	13%
	54	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	dok	55.816.769.200	5	dok	42%	25.662.202.300	30.154.566.900	46%
	55	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	600	org	118.702.876	0	orang	0%			
	56	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potens KLB ke Lab Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	150	Pkt	17.100.000	20	Paket	13%	8.000.000	9.100.000	47%

	57	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	1	dok	27.150.000	0	dok	0%		27.150.000	0%
	58	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	dok	747.023.000	0	dok	0%		747.023.000	0%
	59	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten /Kota	23	unit	109.125.000	0	unit	0%		109.125.000	0%
	60	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	lap	25.115.000	0	lap	0%		25.115.000	0%
	61	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	dok	146.522.054	1	dok	100%	49.009.250	97.512.804	33%
	62	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	unit	242.087.500	0	unit	0%	6.660.000	235.427.500	3%

	63	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	963	org	79.487.800	362	orang	38%	58.875.000	20.612.800	74%
	64	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40	org	8.440.000	5	orang	13%	3.440.000	5.000.000	41%
	65	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	65	org	6.870.000,00	5	orang	8%		6.870.000	0%
	66	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7	Tata nan	124.200.724	1	Tata nan	14%	14.900.450		12%
	67	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3	dok	255.914.761	1	Dok	33%	6.625.000	249.289.761	3%
	68	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	4	Dok	36.587.636,80	2	Dok	50%	14.660.000		40%
	69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	Dok	103.125.598,32	1	Dok	100%	35.385.000		34%
XI	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase akses point sistem informasi kesehatan yang digunakan	100	%	14.223.400			100 %	7.190.000	7.033.400	51%
	70	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22	dok	14.223.400	22	dok	100%	7.190.000	7.033.400	51%

	XII	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk 22 puskesmas dan 3 RSUD yang terakreditasi minimal utama	80	%	177.963.500		100%	33.095.000	144.868.500	19%	
		71	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22	unit	167.634.250	22	unit	100%	25.440.000	142.194.250	15%
		72	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	dok	10.329.250	1	dok	100%	7.655.000	2.674.250	74%
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	86	%	3.507.419.791		9%	103.200.000	3.404.219.791	3%	
	XIII	Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	100	%	5.074.992		0%	-	5.074.992		
		73	Pengendalian Perizinan Praaktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	dok	5.074.992	0	dok	0%		5.074.992	0%
	XIV	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya		Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	100	%	2.660.959.800		26%	97.200.000	2.563.759.800	4%	

		Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										
	74	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dok	3.770.000	0	orang	0%	-	3.770.000	0%
	75	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19	org	2.606.070.800	10	dok	53%	97.200.000	2.508.870.800	4%
	76	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dok	51.119.000	0	Dok	0%			0%
XV		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang berkompetensi	100	%	841.384.999			0%	6.000.000	835.384.999	1%
	77	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50	org	841.384.999	0	orang	0%	6.000.000	835.384.999	1%

IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase apotik, toko obat dan optical yang memiliki izin	100	%	294.162.000			15,9%	290.000	293.872.000	0%	
			Persentase TPP (Tempat pengolahan pangan) yang memenuhi syarat sesuai standar	62	%								
	XVI	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	%	7.030.000			0%	290.000	6.740.000	4%
		78	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT	3	Dok	7.030.000	0	Dok	0%	290.000	6.740.000	4%
	XVI I	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase jumlah industri pangan yang telah memiliki ijin produksi oleh industri rumah tangga	100	%	133.260.000			0%	-	133.260.000	0%

		79	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	3	dok	133.260.000	0	dok	0%		Rp 133.260.000	0%
	XVI II	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase jumlah industri rumah tangga yang mempunyai sertifikat laik higiene sanitasi TPM	100	%	7.665.000			33%	-	7.665.000	0%
		80	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Retoran dan Depot Air Minum (DAM)	3	dok	7.665.000	1	dok	33%		7.665.000	0%

	XIX	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pesentase jumlah IRT yang terdaftar dan telah dilakukan pemeriksaan untuk penerbitan izin edar	100	%	146.207.000			30%	-	146.207.000	0%	
		81	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	66	Unit	146.207.000	20	unit	30%	146.207.000	0%	
	V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat	60	%	291.267.000			33%	32.620.450	258.646.550	11%
	XX	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	42.592.000			50%	28.820.450	13.771.550	68%
		82	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	dok	42.592.000	1	dok	50%	28.820.450	13.771.550	68%

XXI	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	49.970.000			0%	-	49.970.000	0%
83	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2	dok	49.970.000	0	dok	0%		49.970.000	0%
XXI I	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi UKBM	100	%	198.705.000			50%	3.800.000	194.905.000	2%
84	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM	2	dok	198.705.000	1	dok	50%	3.800.000	194.905.000	2%

**REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN DAN UPT
KABUPATEN TANAH LAUT
TRIWULAN I TAHUN 2025**

Realisasi Anggaran Belanja Dinas induk, dan 22 UPT PKM serta 2 RSUD Boejasin, IFK dan Labkesda Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 sd Triwulan I dari Anggaran Dinas Kesehatan Keseluruhan **Rp. 423.426.014.312,09** terealisasi sebesar **Rp. 125.761.705.540 (29,70 %)**, dengan rincian pada tabel

**Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Keseluruhan**

NO	NAMA INSTANSI	ANGGARAN		REALISASI	%
		MURNI	PERGESERAN		
1	DINKES	236.782.080.510,28	256.386.941.271,98	84.268.434.723	32,9%
2	RS H.BOEJASIN	93.951.355.541,88	93.951.355.541,88	28.538.396.727	30,4%
3	RS KH.MANSYUR	31.496.360.901,00	31.461.360.901	9.732.374.680	30,9%
4	IFK	327.577.688,46	274.155.065,61	110.776.374	40,4%
5	LAB	701.858.148,39	655.759.925,88	39.839.129	6,1%
6	PUSKESMAS	26.500.194.373,53	40.696.441.606	5.879.418.103	14,4%
	ANGSAU	1.546.400.000,00	2.306.135.000	493.266.300	21%
	BATAKAN	1.247.326.332,00	1.731.251.365,85	367.574.013	21%
	BATI-BATI	1.534.000.000,00	2.156.569.000	333.362.078	15%
	ASAM-ASAM	1.113.350.828,00	1.814.533.828	315.204.426	17%
	BUMI MAKMUR	1.190.998.906,00	1.773.204.179,92	275.276.818	16%
	JORONG	1.126.581.627,00	1.694.267.627	272.666.051	16%
	KAIT-KAIT	659.756.027,48	1.065.754.027,48	124.829.744	12%
	KINTAP	1.913.000.000,00	2.533.998.000	196.944.535	8%
	PADANG LUAS	832.578.234,00	1.619.777.550,52	206.658.705	13%

	PANYIPATAN	1.382.944.605,00	2.070.519.041,53	256.162.083	12%
	PELAIHARI	1.980.061.300,00	2.990.218.300	247.226.645	8%
	SUNGAI CUKA	876.652.135,00	1.580.068.135	134.992.666	9%
	SUNGAI RIAM	686.382.278,00	1.016.377.048,51	204.443.042	20%
	TAJAU PECAH	1.044.525.725,00	1.766.441.725	269.272.816	15%
	TAMBANG ULANG	1.299.997.386,00	2.154.066.058,60	399.738.066	19%
	TAKISUNG	2.598.411.000,00	3.776.206.000	709.817.075	19%
	TANJUNG HABULU	637.587.322,00	1.051.233.786,04	104.499.510	10%
	TIRTA JAYA	1.021.869.504,05	1.705.482.665,42	183.606.967	11%
	KURAU	719.996.304,00	1.084.143.343,88	110.889.855	10%
	DURIAN BUNGKUK	1.078.000.000,00	1.695.586.000	324.729.912	19%
	BENTOK KAMPUNG	1.134.954.780,00	1.681.620.780	214.481.064	13%
	PANGGUNG	874.820.080,00	1.428.988.143	133.775.732	9%
	TOTAL	389.759.427.163,54	423.426.014.312,09	125.761.705.540	29,70%

Serapan Dinas Kesehatan pada triwulan II dengan serapan Keseluruhan dari pagu **Rp. 423.426.014.312,09** dengan realisasi **Rp.125.761.705.540** atau dengan serapan **(29,70%)**, kendala serapan masih dibawah rata rata, dikarenakan ada penerimaan Dana BOK Non Fisik Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang mana untuk Keegiatannya masih berproses di lapangan dan untuk Pengadaan obat dan alkes Kesehatan pada Dana BOK maupun APBD walaupun proses pengadaan sudah dimulai di awal Triwulan I namun untuk proses pengiriman obat dan proses Pencairan tidak bisa dilaksanakan di Triwulan II

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

Secara khusus pada tahun 2025 arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam upaya meningkatkan kualitas dan perluasan pelayanan kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI), angka kematian bayi lahir (AKB), prevalensi stunting, angka kesakitan

Sejalan dengan Prioritas Nasional Kabupaten Tanah Laut memiliki prioritas pembangunan ketiga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2026 hal tersebut ditetapkan melalui Sasaran yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Mewujudkan Fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas Menggerakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan.
2. Mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.
3. Mewujudkan Peningkatan layanan kesehatan Masyarakat yang Berkualitas.
4. Mewujudkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 program tersebut merupakan penjabaran dari pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan terkait isu Suitable Development Goals (SDGs). Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru. sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan harus terus berupaya meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat baik kuratif, rehabilitatif maupun promotif, preventif.

Penguatan Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 masih tetap difokuskan pada Penguatan health security: kemampuan untuk prevent, detect, response melalui Sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, skrining, karantina kesehatan. Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM Kesehatan melalui Pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas RS dan system rujukan,

Pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di Puskesmas, Pemenuhan vaksin & obat (Pneumonia, TB, HIV/AIDS), Dukungan insentif bagi industri farmasi dan alkes dalam negeri dan Pengelolaan limbah medis.

3. 1 Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran tersebut adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana kerja (Renja) Tahunan yang sejalan dengan rencana strategis (Renstra) yang menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Untuk lebih jelasnya agar mengetahui Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Nilai	70
1.1		Menurunnya Angka Kematian ibu, Menurunnya AKB, Menurunnya Prevelensi Stunting dan Menurunnya Angka Kesakitan	AKI per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	170
			AKB per 1000 kelahiran hidup	Angka	8
			Prevelensi Stunting	%	14%
			Angka Kesakitan	Angka	10
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN	Nilai	70,01 (BB)
2.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	82

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara umum adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang setinggi-tingginya. Tujuan dan Sasaran Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, yaitu **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**. dengan Indikator Tujuan/ Sasaran **“Angka Harapan Hidup (AHH)”** dan **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”** dengan Indikator Tujuan/ Sasaran **“Nilai Sakip Kabupaten”**

Tujuan RPD tersebut didukung oleh tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yakni

“ Menurunnya Angka Kematian ibu, Menurunnya Angka Kematian Bayi, Menurunnya Prevelansi Stunting dan Menurunnya Angka Kesakitan” dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. 2 Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sasaran Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan Kesehatan yaitu :

1. Menurunnya Angka Kematian ibu, Angka Kematian Bayi, Stunting dan Menurunnya Angka Kesakitan

Indikator :

1. AKI per 100.000 Kelahiran Hidup
2. AKB per 1000 Kelahiran Hidup
3. Prevelensi Stunting
4. Angka Kesakitan

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Indikator :

1. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

Dinas Kesehatan (Dinas +27 UPT) untuk Tahun 2025 dengan Pagu Murni Keseluruhan **Rp. 389.759.427.163,54,-** dengan Pagu setelah Perubahan/ Pergeseran Menjadi **Rp. 437.681.708.247,55-** dengan penambahan dana yang bersumber dari DAK/ BOK Dinas Kesehatan maupun usulan dari Kegiatan bersumber APBD sebesar Rp. **47.922.281.084,01** dengan Rincian

NO	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		MURNI	PERUBAHAN	
1	DINKES (induk)	236.782.080.510,28	258.655.651.276,25	21.873.480.756,97
2	RS H.BOEJASIN	93.951.355.541,88	98.250.760.689,40	4.299.405.147,52
3	RS KH.MANSYUR	31.496.360.901,00	38.560.160.771,90	7.063.799.870,90
4	RS DARLAN ISMAIL		500.000.000,-	500.000.000,-
5	IFK	327.577.688,46	312.360.565,61	(15.217.122,85)
6	LABKESDA	701.858.148,39	620.661.602,65	(81.196.545,74)
7	PUSKESMAS (22 UPT)	26.500.194.373,53	40.782.203.350,74	14.282.008.997,21
TOTAL		389.759.427.163,54	437.681.708.247,55	47.922.281.084,01

untuk **Dinas Kesehatan** dengan 5 Program 22 Kegiatan dan 84 Sub Kegiatan dengan pagu Murni **Rp. 236.782.080.510,28** dengan Pagu perubahan /Pergeseran Menjadi **Rp.258.655.651.276,25** sehingga ada Penambahan Sebesar Rp. **21.873.480.756,97** dengan rincian dan dengan rincian Per program

No	Uraian	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Berkurang/ Bertambah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	136.473.096.557,44	151.993.966.188,41	15.520.869.630,97
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	97.303.467.292,84	103.828.075.884,34	6.524.608.591,50
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.798.499.660,00	2.105.012.194,00	693.487.466,00
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	67.720.000,00	294.162.000,00	226.442.000,00-
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	139.297.000,00	434.345.000,00	295.048.000,00
Total		236.782.080.510,28	258.655.561.267,75	21.873.480.756.47

T-C. 3.1
Usulan Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Perubahan 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI 2025	PERGESERAN/ PENAMBAHAN (PPAS)	SELISIH SETELAH PERUBAHAN	PAGU PERGESERAN/ PENAMBAHAN (KESEPAKATAN) (RP)	SELISIH SETELAH KESEPAKATAN	SELISIH TOTAL RP (+/-)	KET
VALIDASI JUMLAH DUIT	236.782.080.510,28	258.655.561.267,25	2.268.619.995,27	258.655.561.267,25	-	21.873.480.756,97	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	136.473.096.557,44	150.680.025.591,91	606.713.972,07	151.993.966.188,41	1.313.940.596,50	15.520.869.630,97	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.914.904,00	136.414.904,00	-	136.414.904,00	-	(40.500.000)	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.020.649,00	117.020.649,00	-	117.020.649,00	-	-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.894.255,00	19.394.255,00	-	19.394.255,00	-	(40.500.000)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	120.157.328.273,00	134.471.891.003,67	-	134.471.891.003,67	-	14.314.562.731	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120.115.188.558,00	134.432.127.778,00	-	134.432.127.778,00	-	14.316.939.220,00	Penambahan gaji pppk di Pergeseran terakhir
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.139.715,00	39.763.225,67	-	39.763.225,67	-	2.376.489,33	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.139.715,00	39.763.225,67	-	39.763.225,67	-	(2.376.489)	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.139.715,00	39.763.225,67	-	39.763.225,67	-	(2.376.489)	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	206.832.000,00	42.000.000,00	30.000.000,00	42.000.000,00	-	(164.832.000)	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56.832.000,00	-	-	-	-	(56.832.000)	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	42.000.000,00	30.000.000,00	42.000.000,00	-	(108.000.000)	Usulan Penambahan Perubahan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.339.316.587,84	1.009.262.168,70	230.521.408,80	2.309.882.765,20	1.300.620.596,50	970.566.177	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.998.176,10	74.996.248,83	4.998.072,73	74.996.248,83	-	4.998.072,73	Usulan Penambahan Perubahan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.988.507,68	159.347.586,91	49.991.055,99	310.816.133,41	151.468.546,50	160.827.625,73	Usulan Penambahan Perubahan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	154.626.761,76	94.649.525,95	35.962.412,95	94.649.525,95	-	- 59.977.235,81	Usulan Penambahan Perubahan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	458.855.108,30	283.427.091,42	29.999.672,52	283.427.091,42	-	- 175.428.016,88	Usulan Penambahan Perubahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	

Penyediaan Bahan/Material	28.400.000,00	37.970.194,61	9.570.194,61	37.970.194,61	-	9.570.194,61	Usulan Penambahan Perubahan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467.449.950,00	350.874.950,00	100.000.000,00	1.500.027.000,00	1.149.152.050,00	1.032.577.050,00	Usulan Penambahan Perubahan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.998.084,00	7.996.570,98	-	7.996.570,98	-	2.001.513,02	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.500.369,60	159.642.378,93	74.142.009,33	159.642.378,93	-	74.142.009	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel	85.500.369,60	159.642.378,93	74.142.009,33	159.642.378,93	-	74.142.009	Usulan Penambahan Perubahan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.697.736.788,00	13.781.673.437,00	-	13.794.993.437,00	13.320.000,00	97.256.649	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.888.220.000,00	1.888.220.000,00	-	1.888.220.000,00	-	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.809.516.788,00	11.893.453.437,00	-	11.906.773.437,00	13.320.000,00	97.256.649	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767.327.920,00	1.039.378.473,94	272.050.553,94	1.039.378.473,94	-	272.050.554	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	568.320.000,00	610.383.600,00	42.063.600,00	610.383.600,00	-	42.063.600	BBM Porprov
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.950.000,00	83.250.000,00	33.300.000,00	83.250.000,00	-	33.300.000	Usulan Penambahan Perubahan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.057.920,00	345.744.873,94	196.686.953,94	345.744.873,94	-	196.686.954	Usulan Penambahan Perubahan
Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	97.303.467.292,84	103.739.608.884,34	1.518.828.023,20	103.828.075.884,34	6.436.141.591,50	6.532.758.592	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.580.375.465,38	39.560.529.639,78	1.156.018.132,40	39.560.529.639,78	-	6.980.154.174	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.945.876.633,21	1.445.876.633,21	- 3.500.000.000,00	1.445.876.633,21	-	- 3.500.000.000,00	Usulan Pemindahan Pagu ke Dinas PU

Pengembangan Puskesmas	4.524.648.786,92	6.533.530.013,34	2.008.881.226,42	6.533.530.013,34	-	2.008.881.226,42	Usulan Penambahan Perubahan (2 IPAL 4 WTP)
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.635.123.063,02	6.555.348.643,37	928.695.580,35	6.555.348.643,37	-	920.225.580,35	Usulan Penambahan Perubahan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.374.602.725,63	3.208.763.916,31	- 165.838.809,32	3.208.763.916,31	-	- 165.838.809,32	Usulan Pengurangan Perubahan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	299.023.727,60	299.023.727,60	-	299.023.727,60	-	-	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.999.289.995,00	5.314.587.243,85	1.348.746.272,85	5.314.587.243,85	-	1.315.297.248,85	Usulan Penambahan Perubahan dan Porprov 300 jt
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	462.300.000,00	429.960.000,00	-	429.960.000,00	-	- 32.340.000,00	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	389.520.000,00	505.162.000,00	-	505.162.000,00	-	115.642.000,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.930.060.000,00	15.145.169.462,10	535.533.862,10	15.145.169.462,10	-	6.215.109.462,10	1. Usulan Penambahan Perubahan (535.533.862,10) 2. Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran (5.746.595.600)
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	19.930.534,00	123.108.000,00	-	123.108.000,00	-	103.177.466,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.502.002.694,46	63.986.892.344,56	362.809.890,80	64.075.359.344,56	88.467.000,00	(426.643.350)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.457.864.062,00	1.142.678.170,00	21.965.892,00	1.142.678.170,00	-	- 315.185.892,00	Usulan Pengurangan Perubahan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	96.678.714,50	34.482.971,60	-	34.482.971,60	-	62.195.742,90	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	468.930.761,00	473.423.261,00	7.492.500,00	473.423.261,00	-	4.492.500,00	Usulan Penambahan Perubahan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	899.676.929,00	43.966.022,95	-	43.966.022,95	-	855.710.906,05	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	440.814.709,00	223.613.519,00	-	223.613.519,00	-	217.201.190,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	342.205.725,18	266.643.237,08	-	266.643.237,08	-	75.562.488,10	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	272.405.343,41	265.406.164,21	19.379.179,20	265.406.164,21	-	6.999.179,20	Usulan Pengurangan Perubahan (19.379.179,20) Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran (14.880.000)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	46.545.504,00	39.844.421,05	-	39.844.421,05	-	6.701.082,95	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	91.742.356,00	72.889.337,00	-	72.889.337,00	-	18.853.019,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	226.157.800,50	214.004.918,70	5.500.000,00	214.004.918,70	-	12.152.881,80	Usulan Penambahan Perubahan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	289.779.067,62	861.938.254,14	-	861.938.254,14	-	572.159.186,52	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	95.203.172,50	76.846.920,00	-	76.846.920,00	-	18.356.252,50	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	140.148.000,00	129.108.000,00	-	129.108.000,00	-	11.040.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	81.098.200,00	44.461.200,00	-	44.461.200,00	-	36.637.000,00	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	107.304.512,50	399.578.294,00	301.593.162,00	399.578.294,00	-	292.273.781,50	Usulan Penambahan Perubahan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37.713.900,00	75.250.900,00	-	75.250.900,00	-	37.537.000,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	634.880.000,00	1.034.982.000,00	-	1.034.982.000,00	-	400.102.000,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	28.850.000,00	235.704.000,00	-	235.704.000,00	-	206.854.000,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	110.600.021,00	71.443.221,00	-	71.443.221,00	-	- 39.156.800,00	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	132.717.050,00	99.815.301,60	-	99.815.301,60	-	- 32.901.748,40	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	46.678.180,00	33.614.544,00	-	33.614.544,00	-	- 13.063.636,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	239.217.244,68	167.612.237,16	-	167.612.237,16	-	- 71.605.007,52	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.175.000,00	25.795.000,00	-	25.795.000,00	-	- 14.380.000,00	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	55.908.119.200,00	55.816.769.200,00	-	55.816.769.200,00	-	- 91.350.000,00	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	119.902.876,00	118.702.876,00	-	118.702.876,00	-	- 1.200.000,00	

Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potens KLB ke Lab Rujukan/Nasional	34.400.000,00	17.100.000,00	-	17.100.000,00	-	- 17.300.000,00	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	63.870.000,00	27.150.000,00	-	27.150.000,00	-	- 36.720.000,00	
Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	-	-	-	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	699.900.000,00	747.023.000,00	-	747.023.000,00	-	47.123.000,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	369.625.000,00	259.119.800,00	149.994.800,00	347.586.800,00	88.467.000,00	- 22.038.200,00	Usulan Penambahan Perubahan
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	41.375.000,00	25.115.000,00	-	25.115.000,00	-	- 16.260.000,00	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	217.041.623,00	146.522.053,95	-	146.522.053,95	-	- 70.519.569,05	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	245.706.000,00	181.662.000,00	- 60.425.500,00	181.662.000,00	-	- 64.044.000,00	Usulan Pengurangan Perubahan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	99.387.800,00	79.487.800,00	-	79.487.800,00	-	- 19.900.000,00	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.710.489,00	8.440.000,00	-	8.440.000,00	-	- 7.270.489,00	

Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	16.336.252,50	6.870.000,00	-	6.870.000,00	-	9.466.252,50	
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	138.888.970,00	124.200.724,00	-	124.200.724,00	-	14.688.246,00	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	15.873.761,00	255.914.761,00	-	255.914.761,00	-	240.041.000,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran
Pengelolaan pelayanan Kelanjut Usia	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Layanan Imunisasi	58.620.697,12	36.587.636,80	-	36.587.636,80	-	22.033.060,32	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	129.858.772,95	103.125.598,32	-	103.125.598,32	-	26.733.174,63	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	19.913.400,00	14.223.400,00	-	14.223.400,00	-	(5.690.000)	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	19.913.400,00	14.223.400,00	-	14.223.400,00	-	(5.690.000)	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	201.175.733,00	177.963.500,00	-	177.963.500,00	-	(15.062.233)	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	182.696.483,00	167.634.250,00	-	167.634.250,00	-	- 15.062.233,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	18.479.250,00	10.329.250,00	-	10.329.250,00	-	(8.150.000)	

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.798.499.660,00	3.507.419.791,00	-	2.105.012.194,50	1.402.407.596,50	(693.487.466)	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	7.753.740,00	5.074.992,00	-	5.074.992,00	-	(2.678.748)	
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7.753.740,00	5.074.992,00	-	5.074.992,00	-	(2.678.748)	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.612.300.800,00	2.660.959.800,00	-	1.258.552.203,50	1.402.407.596,50	(1.404.867.597)	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.230.000,00	3.770.000,00	-	3.770.000,00	-	(2.460.000)	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.606.070.800,00	2.606.070.800,00	-	1.203.663.203,50	1.402.407.596,50	(1.402.407.597)	
Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	51.119.000,00	-	51.119.000,00	-		Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	178.445.120,00	841.384.999,00	-	841.384.999,00	-	662.939.879	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	178.445.120,00	841.384.999,00	-	841.384.999,00	-	662.939.879,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	67.720.000,00	294.162.000,00	-	294.162.000,00	-	226.442.000	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12.000.000,00	7.030.000,00	-	7.030.000,00	-	(4.970.000)	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12.000.000,00	7.030.000,00	-	7.030.000,00	-	(4.970.000)	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	34.100.000,00	133.260.000,00	-	133.260.000,00	-	99.160.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	34.100.000,00	133.260.000,00	-	133.260.000,00	-	99.160.000,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10.635.000,00	7.665.000,00	-	7.665.000,00	-	(2.970.000)	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10.635.000,00	7.665.000,00	-	7.665.000,00	-	(2.970.000)	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	10.985.000,00	146.207.000,00	-	146.207.000,00	-	135.222.000	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	10.985.000,00	146.207.000,00	-	146.207.000,00	-	135.222.000,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	139.297.000,00	434.345.000,00	143.078.000,00	434.345.000,00	-	295.048.000	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.592.000,00	66.592.000,00	24.000.000,00	66.592.000,00	-	24.000.000	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	42.592.000,00	66.592.000,00	24.000.000,00	66.592.000,00	-	24.000.000,00	Usulan Penambahan Perubahan

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.970.000,00	169.048.000,00	119.078.000,00	169.048.000,00	-	119.078.000	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	49.970.000,00	169.048.000,00	119.078.000,00	169.048.000,00	-	119.078.000,00	Usulan Penambahan Perubahan (Porprov rompi)
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.735.000,00	198.705.000,00	-	198.705.000,00	-	151.970.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	46.735.000,00	198.705.000,00	-	198.705.000,00	-	151.970.000,00	Penambahan DAK Non Fisik di Pergeseran

T-C. 3.2
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P- PPAS) Tahun 2025
Dinas Kesehatan dan UPT

NO	NAMA INSTANSI	ANGGARAN			KET
		MURNI	PERUBAHAN	(+/-)	
1	DINAS KESEHATAN	236.782.080.510,28	258.655.561.267,25	21.873.480.756,97	
UPT					
2	ANGSAU	1.546.400.000,00	2.306.135.000	759.735.000,00	
3	BATAKAN	1.247.326.332,00	1.731.251.365,85	483.925.033,85	
4	BATI-BATI	1.534.000.000,00	2.006.569.000	472.569.000,00	
5	ASAM-ASAM	1.113.350.828,00	1.814.533.828	701.183.000,00	
6	BUMI MAKMUR	1.190.998.906,00	1.711.204.179,92	20.205.273,92	
7	JORONG	1.126.581.627,00	1.602.145.700,00	475.564.073,00	
8	KAIT-KAIT	659.756.027,48	1.247.754.027,48	587.998.000,00	
9	KINTAP	1.913.000.000,00	2.533.998.000,00	620.998.000,00	
10	PADANG LUAS	832.578.234,00	1.769.277.550,52	936.699.316,52	
11	PANYIPATAN	1.382.944.605,00	1.918.422.361,53	535.477.756,53	
12	PELAIHARI	1.980.061.300,00	2.990.218.300	1.010.157.000,00	
13	SUNGAI CUKA	876.652.135,00	1.580.068.135	703.416.000,00	
14	SUNGAI RIAM	686.382.278,00	931.377.048,51	244.994.770,51	
15	TAJAU PECAH	1.044.525.725,00	1.808.441.725,00	763.916.000,00	
16	TAMBANG ULANG	1.299.997.386,00	2.204.066.058,60	904.068.672,60	
17	TAKISUNG	2.598.411.000,00	3.776.206.000	1.177.795.000,00	
18	TANJUNG HABULU	637.587.322,00	1.051.233.786,04	413.646.464,04	
19	TIRTA JAYA	1.021.869.504,05	1.705.482.665,42	683.613.161,37	

20	KURAU	719.996.304,00	1.084.143.343,88	364.147.039,88	
21	DURIAN BUNGKUK	1.078.000.000,00	1.645.586.000	567.586.000,00	
22	BENTOK KAMPUNG	1.134.954.780,00	1.608.325.930,00	473.371.150,00	
23	PANGGUNG	874.820.080,00	1.428.988.142,99	554.168.062,99	
24	LABKES	701.858.148,39	620.661.602,65	(81.196.545,74)	
25	IFK	327.577.688,46	312.360.565,61	(15.217.122,85)	
26	RSUD BOEJASIN	93.951.355.541,88	98.250.760.689,40	4.299.405.147,52	
27	RSUD MANSYUR	31.496.360.901,00	38.560.160.771,90	7.063.799.870,90	
28	RSUD DARLAN		500.000.000	500.000.000,00	
TOTAL		389.759.427.163,54	437.354.933.045,55	47.595.505.882,01	

Pada perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan TA 2025 ini dengan melakukan pergeseran Anggaran antar sub Kegiatan/ Kegiatan/program dengan Tujuan Kegiatan agar terserap maksimal dan sesuai target yang diharapkan Rencana Kerja Tahun 2025 mengalami Penambahan yakni dari pagu Murni **Rp. 389.759.427.163,54,-** dengan Pagu Perubahan **Rp. 437.354.933.045,55,-** atau dengan Penambahan **Rp. 47.595.505.882,01,-** Perubahan/Pergeseran Anggaran terjadi karena adanya beberapa Kegiatan yang harus laksanakan pada Tahun 2025 dimana ada beberapa kegiatan yang belum tercover pada Anggaran Murni Dinas Kesehatan yakni :

1. Ada Beberapa Sub Kegiatan yang bergeser didalam/ Antar Rekening
2. penambahan Dana untuk Dana APBD, DAK Fisik dan Non Fisik dan Bok Puskesmas dan DAK Bok BPOM
3. Penambahan untuk Penggajian P3K
4. Pergeseran/Penambahan Silpa untuk Puskesmas
5. Penambahan untuk kegiatan Fisik untuk UPT
6. Penambahan untuk mendukung Kegiatan Porprov
7. Penambahan Dana untuk RS Baru Darlan Ismail
8. Perubahan pada target Pendapatan

T-C. 3.3
Rekap Pagu Kesepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Kesepakatan P - PPAS) Tahun 2025
Dinas Kesehatan dan UPT

NO	NAMA INSTANSI	ANGGARAN			KET
		P- PPAS	KESEPAKATAN P-PPAS	(+/-)	
1	DINAS KESEHATAN	258.655.561.267,25	258.655.561.267,25		
UPT					
2	ANGSAU	2.306.135.000	2.491.135.000	185.000.000,00	
3	BATAKAN	1.731.251.365,85	1.731.251.365,85		
4	BATI-BATI	2.006.569.000	2.006.569.000		
5	ASAM-ASAM	1.814.533.828	1.814.533.828		
6	BUMI MAKMUR	1.711.204.179,92	1.711.204.179,92		
7	JORONG	1.602.145.700,00	1.602.145.700,00		
8	KAIT-KAIT	1.247.754.027,48	1.247.754.027,48		
9	KINTAP	2.533.998.000,00	2.533.998.000,00		
10	PADANG LUAS	1.769.277.550,52	1.769.277.550,52		
11	PANYIPATAN	1.918.422.361,53	1.918.422.361,53		
12	PELAIHARI	2.990.218.300	2.990.218.300		
13	SUNGAI CUKA	1.580.068.135	1.580.068.135		
14	SUNGAI RIAM	931.377.048,51	931.377.048,51		
15	TAJAU PECAH	1.808.441.725,00	1.808.441.725,00		
16	TAMBANG ULANG	2.204.066.058,60	2.204.066.058,60		
17	TAKISUNG	3.776.206.000,00	3.776.206.000,00		
18	TANJUNG HABULU	1.051.233.786,04	1.193.008.988,04	141.775,202,00	

19	TIRTA JAYA	1.705.482.665,42	1.705.482.665,42		
20	KURAU	1.084.143.343,88	1.084.143.343,88		
21	DURIAN BUNGKUK	1.645.586.000	1.645.586.000		
22	BENTOK KAMPUNG	1.608.325.930,00	1.608.325.930,00		
23	PANGGUNG	1.428.988.142,99	1.428.988.142,99		
24	LABKES	620.661.602,65	620.661.602,65		
25	IFK	312.360.565,61	312.360.565,61		
26	RSUD BOEJASIN	98.250.760.689,40	98.250.760.689,40		
27	RSUD MANSYUR	38.560.160.771,90	38.560.160.771,90		
28	RSUD DARLAN	500.000.000	500.000.000,00		
TOTAL		437.354.933.045,55	437.681.708.247,00	326.775.202,00	

Untuk pagu diatas, terdapat adanya Penambahan pada pagu Perubahan PPAS dimana ada usulan dari 2 (dua) Upt Puskesmas yang mengusulkan Penambahan Silpa pada Belanja BLUD yakni Puskesmas Angsau dan Puskesmas Tanjung Habulu yang di setujui oleh TAPD dan Badan Anggaran yang dituangkan pada Pagu Kesepakatan (Kesepakatan P – PPAS)

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kelanjutan program dan kegiatan tahun 2025 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan materi awal penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 melalui anggaran APBD Kab dan Provinsi serta APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pemerintahan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dan disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, lintas sektor, para pemangku kepentingan, mitra kesehatan dan kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 memuat program, kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan. Untuk Tahun 2025 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terdiri dari **5** (lima) Program, **22** (dua puluh dua) Kegiatan dan **84** (delapan puluh empat) Sub Kegiatan untuk keseluruhan pagu Dinas Kesehatan dengan 24 UPT Puskesmas dan 3 RSUD dengan Pagu awal sebesar **Rp. 389.759.427.163,54,-** (*tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh empat rupiah*) dengan pagu Perubahan menjadi **Rp 437.681.708.247,55,-** (*empat ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah*) sehingga ada Penambahan pagu sebesar **Rp 47.922.281.084,01,-** (*empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat koma nol satu rupiah*),

Anggaran Pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini sudah mengakomodir semua kebutuhan Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2025

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025

Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan selaras dengan Kebijakan Daerah khususnya Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara luas dan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini

Pelaihari, Juni 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut,

dr.Hj. Isna Farida, M.Kes
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19740612 200501 2 016